

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA
AKIBAT NIKAH SIRI**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)
Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh:
MAS'UD DZAKIRI
NIM : 20086040012

**PROGRAM PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADADAP WANITA
AKIBAT NIKAH SIRI**

Disusun Oleh :

MAS'UD DZAKIRI

NIM: 20086040012

Telah Disetujui Pada Tanggal 11 Agustus 2022

Pembimbing I,

Prof. Dr. H.E. Sugianto, SH., MH.
NIP. 19670208 200501 1 001

Pembimbing II,

Dr. H. Wasman, M.Ag.
NIP. 19590107 199201 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAS'UD DZAKIRI
NIM : 20086040012
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pada : Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Syekh Nurjati Cirebon

Menyatakan bahwa TESIS berjudul: “Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Akibat Nikah Siri” secara keseluruhan adalah ASLI hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini dibuat dengan sejujurnya dan dengan penuh kesungguhan hati, disertai kesiapan untuk menanggung segala resiko yang mungkin diberikan, sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



MAS'UD DZAKIRI

Prof. Dr. H.E. Sugiarto, SH., MH.

Program Pascasarjana

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lamp. : 5 eksemplar

Hal : Penyerahan Tesis

Kepada Yth;

Direktur Program Pascasarjana

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

Di

CIREBON

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara Mas'ud Dzakiri, NIM. 20086040012 yang berjudul: "*Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Akibat Nikah Siri*" telah dapat diujikan. Bersama ini, kami kirimkan naskahnya untuk segera dapat diujikan dalam sidang tesis Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatian Saudara, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 11 Agustus 2022

Pembimbing I,

Prof. Dr. H.E. Sugiarto, SH., MH.
NIP. 19670208 200501 1 001

Dr. H. Wasman, M.Ag

Program Pascasarjana

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lamp. : 5 eksemplar

Hal : Penyerahan Tesis

Kepada Yth;

Direktur Program Pascasarjana

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

Di

CIREBON

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara Mas'ud Dzakiri, NIM. 20086040012 yang berjudul: "*Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Akibat Nikah Siri*" telah dapat diujikan. Bersama ini, kami kirimkan naskahnya untuk segera dapat diujikan dalam sidang tesis Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 11 Agustus 2022

Pembimbing II,



Dr. H. Wasman, M.Ag.

NIP. 19590107 199201 1 001

LEMBAR PENGESAHAN
PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADADAP WANITA
AKIBAT NIKAH SIRI

Disusun Oleh :

MAS'UD DZAKIRI

NIM: 20086040012

Telah diujikan pada tanggal 02 September 2022
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.)

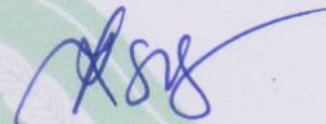
Dewan Penguji

Ketua,

Sekretaris,



Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag.
NIP. 19590320 198403 1 002



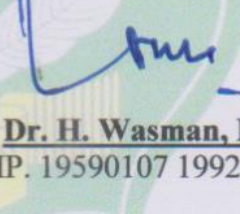
H. Didin Nurul Rosvidin, M.A., Ph.D.
NIP. 19730404 199803 1 005

Pembimbing I / Penguji,

Pembimbing II / Penguji,

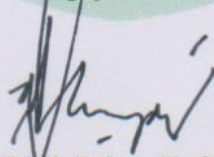


Prof. Dr. H.E. Sugianto, SH., MH.
NIP. 19670208 200501 1 001




Dr. H. Wasman, M.Ag.
NIP. 19590107 199201 1 001

Penguji Utama,



Dr. H. Didi Sukardi, SH., MH.
NIP. 19691226 200912 1 001

Direktur,

Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag.
NIP. 19590320 198403 1 002

ABSTRAK

Mas'ud Dzakiri: “Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Akibat Nikah Siri”

Nikah bawah tangan, nikah agama atau yang lebih dikenal dengan nikah siri merupakan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat rukun nikah dalam agama Islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Dikatakan nikah siri karena dilangsungkan secara diam-diam, tertutup, sembunyi-sembunyi tanpa adanya publikasi. Pernikahan siri dilaksanakan tanpa sepengetahuan petugas resmi yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN atau Kepala KUA) dan tidak dicatatkan tetapi telah sah secara agama Islam. Di wilayah Kabupaten Kuningan, kasus nikah siri pun tidak sedikit jumlahnya. Hasil dari pendataan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap kecamatan di Kabupaten Kuningan, pada tahun 2020 dari sejumlah 32 kecamatan yang ada, terdapat kasus pasangan nikah yang tidak tercatat (nikah Siri) berjumlah 103 pasangan yang tersebar di 24 kecamatan.

Masalah penelitian ini adalah bagaimana faktor penyebab terjadinya pernikahan siri di Kabupaten Kuningan? Bagaimana peranan pemerintah dalam meminimalisir perilaku pernikahan siri di Kabupaten Kuningan? Bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap wanita akibat nikah siri di Kabupaten Kuningan?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya pernikahan siri di Kabupaten Kuningan; mengetahui dan menganalisis peranan pemerintah dalam meminimalisir perilaku pernikahan siri di Kabupaten Kuningan, dan menganalisis upaya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap wanita akibat nikah siri di Kabupaten Kuningan.

Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa peran pemerintah Kabupaten Kuningan belum maksimal perannya dalam meminimalisir praktek pernikahan siri terbukti dengan masih adanya oknum tokoh agama yang melayani praktek nikah siri. Faktor penyebab terjadinya pernikahan siri: alasan usia sudah lanjut dan beranggapan tidak akan mempunyai keturunan; tidak mendapat restu dari orang tua; digerebek oleh masyarakat karena sedang melakukan perbuatan yang tidak senonoh sehingga masyarakat mendorong keluarganya untuk segera menikahkannya; telah terjadi hamil di luar nikah; karena jauh dari keluarga dan kesibukan serta aktivitas pekerjaan dengan intensitas waktu yang lama baru pulang, takut akan terjerumus dalam perbuatan zina; karena masih dibawah umur; dan karena faktor ekonomi keluarga. Dan upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan sebagai bentuk perlindungan terhadap wanita akibat nikah siri diantaranya dengan melaksanakan program Istbat Nikah Massal yang ditanggung pemerintah.

Kata kunci: *Peran Pemerintah, Perlindungan Hukum dan Akibat Nikah Siri*

ABSTRACT

Mas'ud Dzakiri: *"The Role of the Local Government of Kuningan Regency in Legal Protection Efforts Against Women Due to Siri Marriage"*.

Underhand marriage, religious marriage or better known as siri marriage is a marriage that is carried out in accordance with the requirements of the pillars of marriage in Islam, but is not registered at the Office of Religious Affairs (KUA). It is said to be a siri marriage because it is carried out secretly, secretly, secretly without any publication. Unregistered marriages are carried out without the knowledge of the official officer, namely the Marriage Registrar (PPN or Head of KUA) and are not registered but are legally Muslim. In the Kuningan Regency area, cases of unregistered marriages are not small in number. The results of data collection conducted by the Office of Religious Affairs (KUA) in every sub-district in Kuningan Regency, in 2020 from a number of 32 sub-districts, there were cases of unregistered marriage partners (Siri marriage) totaling 103 couples spread over 24 districts.

The problem of this research is What are the factors causing the occurrence of unregistered marriages in Kuningan Regency? How is the government's role in minimizing the behavior of unregistered marriages in Kuningan Regency? What are the efforts of the Regional Government in implementing legal protection for women due to unregistered marriages in Kuningan Regency?

The purpose of this study was to identify and analyze the factors causing the occurrence of unregistered marriages in Kuningan Regency; to identify and analyze the role of the government in minimizing the behavior of unregistered marriages in Kuningan Regency, and to analyze the efforts of the Regional Government in implementing legal protection for women due to unregistered marriages in Kuningan Regency.

This research method is carried out using qualitative research, a research process and understanding based on a methodology that investigates a social phenomenon and human problem.

The results of this study conclude that the role of the Kuningan Regency government has not maximized its role in minimizing the practice of unregistered marriage, as evidenced by the existence of unscrupulous religious leaders who serve the practice of unregistered marriage. Factors causing unregistered marriages: reasons for advanced age and the assumption that they will not have children; does not get the blessing of parents; was raided by the community because they were doing an indecent act so that the community encouraged her family to immediately marry her off; there has been a pregnancy out of wedlock; because he is far from his family and busyness and work activities with the intensity of a long time just coming home, afraid that he will fall into adultery; because they are underage; and because of family economic factors. And the government's efforts to overcome problems as a form of protection for women due to unregistered marriages include implementing the Mass Marriage Istbat program which is borne by the government.

Keywords: *Role of Government, Legal Protection and Consequences of Siri Marriage*

المخلص

مسعود ذاكري: "دور حكومة كوينغان الإقليمية في جهود الحماية القانونية ضد المرأة بسبب زواج سيرى"

الزواج المخادع أو الزواج الديني أو المعروف باسم زواج السيرى هو زواج يتم إجراؤه وفقاً لمتطلبات أركان الزواج في الإسلام ، ولكنه غير مسجل في مكتب الشؤون الدينية. يقال إنه زواج سيرى لأنه يتم سرا أو سرا أو سرا دون أي نشر. لذا فإن زواج السيرى هو زواج يتم سرا دون علم المسؤول الرسمي ، أي مسجل الزواج (أو رئيس) وغير مسجل ولكنه إسلامي قانونياً. في منطقة كوينغان ريجنسي ، حالات الزواج غير المسجلة ليست قليلة العدد. نتاج جمع البيانات التي أجراها مكتب الشؤون الدينية في كل منطقة فرعية في منطقة كوينغان ريجنسي ، في عام 2020 من عدد 32 مقاطعة فرعية ، كانت هناك حالات لشركاء زواج غير مسجلين (زيجات سيرى) بلغ مجموعها 103 أزواج موزعين على 24 مقاطعة .

مشكلة هذا البحث هي كيف العوامل المسببة لحدوث الزيجات غير المسجلة في كوينغان ريجنسي؟ ما هو دور الحكومة في التقليل من سلوك الزيجات غير المسجلة في كوينغان ريجنسي؟ ما هي جهود الحكومة الإقليمية في تنفيذ الحماية القانونية للنساء بسبب الزيجات غير المسجلة في كوينغان ريجنسي؟

كان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد وتحليل العوامل التي تسبب حدوث الزيجات غير المسجلة في منطقة كوينغان ريجنسي. معرفة وتحليل دور الحكومة في تقليل سلوك الزواج غير المسجل في كوينغان ريجنسي ، وتحليل جهود الحكومة الإقليمية في تنفيذ الحماية القانونية للمرأة بسبب الزواج غير المسجل في كوينغان ريجنسي.

يتم تنفيذ طريقة البحث هذه باستخدام البحث النوعي وعملية البحث والفهم بناءً على منهجية تحقق في ظاهرة اجتماعية ومشكلة إنسانية

وخلصت نتائج هذه الدراسة إلى أن دور حكومة كوينغان ريجنسي لم يعظم دورها في التقليل من ممارسة الزواج غير المسجل ، كما يتضح من وجود زعماء دينيين عديمي الضمير يخدمون ممارسة الزواج غير المسجل. العوامل المسببة للزيجات غير المسجلة: أسباب تقدم العمر وافتراض عدم إنجاب الأطفال ؛ لا ينال نعمة الوالدين. تم اقتحامها من قبل المجتمع لأنهم قاموا بعمل غير لائق بحيث شجع المجتمع أسرته على تزويجها على الفور ؛ كان هناك حمل خارج إطار الزواج ؛ لأنه بعيد عن عائلته وانشغاله وأنشطة العمل مع شدة وقت طويل لمجرد العودة إلى المنزل ، خوفاً من الوقوع في الزنا ؛ لأنهم دون السن القانونية. وبسبب العوامل الاقتصادية للأسرة. وتشمل جهود الحكومة للتغلب على المشاكل كشكل من أشكال الحماية للمرأة بسبب الزيجات غير المسجلة تنفيذ برنامج استبطان الزواج الجماعي الذي تتحمله الحكومة.

الكلمات الرئيسية: دور الحكومة والحماية القانونية ونتائج زواج سيرى

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya serta limpahan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul: *“Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Akibat Nikah Siri”*.

Shalawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Rasul junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam penulisan tesis ini penulis banyak mendapat dorongan, bimbingan dan bantuan dari semua pihak, baik berupa moril maupun materil. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah melimpahkan semua nikmat dan karunianya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan penulisan tesis ini.
2. Dr. H. Sumanta, M.Ag., Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.
3. Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag., Selaku Direktur Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. Prof. Dr. H.E. Sugianto, SH., MH., Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan motivasi, ilmu serta bimbingannya dalam penulisan tesis.

5. Dr. H. Wasman, M.Ag., Selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan pengetahuan, motivasi serta ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.
6. Segenap Dosen dan Staf Akademika Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang telah memberikan banyak ilmu dalam setiap proses akademik.
7. Segenap karyawan perpustakaan pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang telah membantu dalam penyediaan referensi bagi penulis.
8. Istri tercinta Eti Sumiati, AM.Kep., yang selalu memberikan dukungan dan motivasinya selama proses perkuliahan sampai pada penyelesaian penulisan tesis ini.
9. Anak-anaku tersayang Fawwaz Cheryll Author Dzakiry dan Keyza Childa Alena Dzakiry.

Penulis sadar sepenuhnya, meskipun segala daya dan upaya telah penulis usahakan semaksimal mungkin, namun masih ada kekurangan ataupun kekhilafan dalam penulisan tesis ini, maka dari itu penulis sangat berterima kasih dan terbuka apabila ada masukan saran dan kritik yang membangun dalam rangka penyempurnaan tesis ini.

Hanya kepada Allah SWT penulis panjatkan doa, semoga amal baik Bapak/Ibu/ Saudara/i yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT. Jazakumullah Ahsanal Jaza. Amiin.

Cirebon, Agustus 2022

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II : LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Landasan Teori	12
B. Kerangka Teori	57
C. Kajian Pustaka (Penelitian Terdahulu)	65
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	73
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	73
B. Metode Pendekatan	75
C. Metode Pengumpulan Data	76
D. Sumber Data	84
E. Teknik Analisis Data	85
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	87
A. Faktor Penyebab terjadinya Pernikahan Siri di Kabupaten Kuningan	87

B. Peranan Pemerintah Dalam Meminimalisir Perilaku Pernikahan Siri di Kabupaten Kuningan	96
C. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Akibat Nikah Siri di Kabupaten Kuningan	102
BAB V : PENUTUP	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Kerangka Teori 64



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	: Daftar Peserta Itsbat Nikah Massal Tahun 2020	78
-----------	---	----



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, masing-masing No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

ا	: A	ص	: ş	ه	: h
ب	: B	ض	: ḍ	ء	: ʾ
ت	: T	ط	: ṭ	ي	: y
ث	: ś	ظ	: z		
ج	: J	ع	: ʿ		
ح	: ḥ	غ	: g		
خ	: Kh	ف	: f		
د	: D	ق	: q		
ذ	: ž	ك	: k		
ر	: R	ل	: l		
ز	: z	م	: m		
س	: s	ن	: n		
ش	: sy	و	: w		

2. Vokal

a. Vokal Pendek

اَ : a

اِ : i

اُ : u

b. Vokal Panjang

اَ : ā / اِ

اِ : ī

اُ : ū

3. Tasydid

Dilambangkan dengan penulisan ganda konsonan yang bersangkutan.

Contoh: رَبَّنَا rabbana